BAB II

LANDASAN TEORI

A. Kajian Teoritik

1. Alat Peraga Kampanye

a. Pengertian Alat Peraga Kampanye

Alat peraga adalah suatu alat atau benda yang bisa diserap oleh mata dan panca indra lainnya dengan tujuan dapat membantu tercapainya tujuan. Alat peraga bertujuan untuk mengkomunikasikan atau memberikan pesan kepada siapa yang membaca dan melihatnya. Sedangkan pengertian kampanye adalah alat komunikasi antara perseorangan atau kelompok dengan tujuan mempengaruhi orang yang mengikuti. Jadi, secara keseluruhan pengertian alat peraga kampanye adalah suatu alat komunikasi yang berbentuk perseorangan dengan tujuan mempengaruhi atau memberikan informasi, pesan kepada siapa yang menjadi target dalam kampanye tersebut.

Alat Peraga kampanye menurut PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan, atau informasi lainnya yang dipasang untuk keperluan Kampanye Pemilu yang bertujuan untuk mengajak orang memilih Peserta Pemilu dan/atau calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Walikota tertentu.[1] Konten atau isi bahan kampanye tersebut memuat visi, misi, dan program kandidat atau pasangan kandidat, simbol-simbol, atau tanda gambar pasangan calon. Kata-kata atau gambar yang dimuat bertujuan mengajak orang memilih kandidat atau pasangan kandidat tertentu.

b. Bentuk Alat Peraga Kampanye

KPU Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan alat peraga kampanye terdiri dari berbagai bentuk diantaranya, yaitu: [2]

a. Baliho adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain, kayu/plastik dan atau sejenisnya untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat.

b. Umbul-umbul adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain sedemikian rupa corak dan ragamnya, untuk memperkenalkan, menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.

c. Spanduk adalah alat peraga simbol atau lambang yang terbuat dari kain termasuk kertas dan plastik untuk memperkenalkan,

[1] PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
[2] *Ibid.*

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menganjurkan atau memujikan, menarik perhatian umum kepada yang berhubungan dengan suatu kegiatan yang dapat dilihat atau dibaca oleh masyarakat dan diselenggarakan secara insidental atau sementara.

c. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 tentang Pemasangan Alat Peraga Kampanye

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 tahun 2015 yang merupakan perubahan dari Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 tahun 2013 tentang tentang pencalonan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota telah mengatur secara jelas tentang makanisme pemasangan alat peraga berbunyi sebagai berikut:[3]

1. KPU Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, yakni:
    a. Baliho/billboard/vedeotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk setiap Kabupaten/Kota.
    b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan.
    c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 buah setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.

[3] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. Alat peraga kampanye tidak ditempatkan pada tempat ibadah, rumah sakit atau tempat-tempat pelayanan kesehatan, gedung milik pemerintah, lembaga pendidikan (gedung dan sekolah), jalan-jalan protokol, jalan bebas hambatan, sarana dan prasarana publik, taman dan pepohonan.

2. Tinjauan Tentang Konsep Golongan Putih (Golput)

Menurut Dulay, golongan putih diakronimkan menjadi golput adalah sekelompok masyarakat yang lalai dan tidak bersedia memberikan hak pilihnya dalam even pemilihan dengan berbagai macam alasan, baik pada pemilu legeslatif, pilpres, pilkada, maupun pemilihan kepala desa. Sedangkan menurut Budiman golput adalah orang yang dengan sengaja datang ke TPS dan membuat pilihanya tidak sah dengan mencoblos gambar putih. Kita bisa memperluas definisi golput dengan orang yang tidak percaya dengan hasil pemilu dan tidak mau berpartisipasi. Ia tidak bisa datang ke TPS atau datang tetapi membuat suara tidak sah.[4]

Berdasarkan kedua pendapat di atas dapat diasumsikan bahwa golongan putih (golput) adalah individu atau masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam pemilihan umum karena berbagai macam alasan. Pada penelitian ini yang dimaksud golput adalah para masyarakat kelurahan Kampung Baru kecamatan Labuhan Ratu kota Bandar Lampung yang termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) tetapi tidak menggunakan hak pilihnya pada pemilihan Walikota Tahun 2015 dikarnakan berbagai alasan.

[4] Efriza ,*Political explore*,Bandung : Alfabeta ,2012 hal. 540

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun menurut Efriza mengungkapkan setidaknya ada 4 faktor utama yang dapat menjelaskan masyarakat yang perilaku tidak memilih atau golput sebagai berikut:[5]

1. Faktor psikologi

Menjelasan golput dari faktor psikologis pada dasarnya dapat dikelompokan dalam 2 kategori. *Pertama,* berkaitan dengan ciri-ciri kepribadian seseorang. *Kedua,* berkaitan dengan orientasi kepribadian. Penjelasan pertama melihat bahwa perilaku golput diesebabkan oleh kepribadian yang tidak toleran, otoriter, tak acuh, perasaan tidak aman, perasaan hawatir, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi dan semacamnya. Hal itu dikarenakan apa yang diperjuangkan kandidat atau parpol tidak selalu sejalan dengan kepentingan perorangan secara langsung, betapapun hal itu menyangkut kepentingan yang lebih luas. Pada konteks semacam ini, para pemilih yang mempunyai kepribadian tidak toleran atau tidak acuh cendrung untuk tidak memilih. Ciri-ciri dari perilaku golput berdasarkan faktor psikologis ini umumnya diperoleh sejak lahir (bahkan lebih bersifat keturunan). Dan selanjutnya secara konsisten dalam setiap perilaku. Faktor yang lain yang dapat digunakan untuk menandai ciri kepribadian ini adalah keefektifan personal (*personal effectiveness*), yaitu kemampuan atau ketidak mampuan seseorang untuk memimpin lingkungan di sekitarnya.

Sementara itu, penjelasan kedua lebih menitik beratkan faktor orientasi kepribadian. Sherman (Efriza, 2012: 538) Melihat bahwa perilaku golput disebabkan oleh orientasi kepribadian pemilih, yang secara konseptual

[5] Efriza , Political explore, bandung : Alfabeta , 2012 hal 543

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menunjukkan karakteristik apatis, anomali dan alienasi. Secara teoritis, perasaan apatis sebenarnya merupakan penjelasan atau pengembangan lebih jauh dari kepribadian otoriter, yang secara sengaja ditandai dengan tiadanya minat terhadap persoalan-persoalan politik. Hal ini bisa disebabkan oleh rendahnya sosialisasi atau rangsangan politik, atau adanya perasaan bahwa aktifitas politik tidak menyebabkan perasaaan kepuasan atau hasil secara langsung. Anomi menunjukkan pada perasaan tidak berguna. Mereka merasa tidak mungkin mampu mempengaruhi peristiwan dan kebijaksanaan politik. Bagaimana para pemilih semacam ini, memilih atau tidak memilih, tidak mempengaruhi apa-apa, karena keputusan-keputusan politik sering kali berada di luar kontrol para pemilih. Perasaan *power lessness* inilah yang disebut dengan anomi. Sedangkan alienasi berada di luar apatis dan anomi. Aliensi merupakan perasaan keterasingan secara aktif. Seseorang merasa dirinya tidak terlibat dalam banyak urusan politik. Pemerintah dianggap tidak mempunyai pengaruh terhadap kehidupan seseorang. Bahkan mereka dianggap sebagai suatu yang mempunyai kosekuensi jahat terhadap kehidupan manusia. Jika perasaan alienasi ini memuncak, mungkin akan mengambil bentuk alternative aksi politik, seperti melalui kerusakan, kekacauan, demonstrasi, dan semacamnya.

2. Faktor sistem politik

Tingsten menjelaskan ada hubungan antara sistem pemilu atau sistem perwakilan yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap persentase kehadiran dan ketidak hadiran seseorang dalam bilik suara. Hasil studi yang dilakukan Tingsten menyimpulkan, dinegara-negara yang menerapkan sistem pemilu atau

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

sistem perwakilan berimbang, rata-rata jumlah pemilih yang hadir cukup tinggi. Sementara itu negara yang menerapkan *sistem distrik* jumlah pemilih relative rendah. Hal ini dikarenakan, dalam sistem perwakilan berimbang perolehan kursi sangat bergantung pada proporsi jumlah suara pemilih. Sementara itu, dalam sistem proporsional mempunyai semangat yang lebih besar memilih betapapun mereka menyadari partai atau dapil, sebab suaranya tidak hilang karena digabungkan dengan perolehan suara didaerah pemilihan lainya. Faktor sistem politik berkaitan dengan sistem politik khususnya sistem pemilu secara langsung.[6]

Pemilih melakukan perotes terhadap sistem politik dan sistem pemilu terutama kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah. Sistem politik yang dibangun rezim berkuasa saat ini dirasa pemilih tidak mempu membangun demokrasi yang sehat. Sistem pemilu Proposional juga dinilai tidak menjamin kedekatan antara wakil dan yang terwakili.

3. Faktor Kepercayaan Politik

Pada literatur ilmu politik, konsep kepercayaan oleh para akhli banyak digunakan untuk menjelaskan ketidak aktifan (*inactivity)* seseoang dalam dunia politik. Menurut Khoirudin fenomena meningkatnya golput harus dipandang dalam dua persfektif. Pertama, munculnya ketidakpercayaan terhadap saluran politik dalam bentuk partai dan kandidat, yang kemudian berakibat pada perspektif kedua, keinginan warga negara untuk melakukan delegitimasi terhadap

[6] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kekuasaan. Padahal, tanpa legitimasi warga negara sesungguhnya sebuah kekuasaan dapat dianggap tidak ada. [7]

Faktor tersebut sebagai bentuk perilaku golput sebagai ekspresi atas kepercayaan yang rendah terhadap sistem politik atau sebagai suatu ekspresi perasaan keterasingan. Sedangkan menurut Asfar golput disebabkan karna beberapa hal, yaitu:[8]

1. Ketidakhadiran diinterpretasikan sebagai bentuk ketidak percayaan kepada sistem politik, berbeda dengan kehadiran yang sering diinterpretasikan sebagai bentuk "loyalitas" atau kepercayaan pada sistem politik yang ada.
2. Ketidakhadiran pemilih dianggap sebagai reaksi/ekspresi dari ketidaksukaan masyarakat terhadap rezim yang berkuasa. Asumsi tersebut menyiratkan kondisi bahwa ketidakhadiran pemilih dimaknai sebagai indikator lemahnya legitimasi rezim yang berkuasa.
3. Ketidak percayaan anggota masyarakat terhadap parpol dan kandidat.
4. Faktor latar belakang satus sosial-ekonomi, setidaknya ada tiga indikator yang bisa digunakan untuk mengukur variabel status sosial-ekonomi, yaitu tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan pekerjaan. Tingginya tingkat kehadiran pemilih dari pemilih yang berpendidikan dan berpenghasilan tinggi. Hasil temuan Verba dan Nie menyimpulkan "*the best knows about turnout is that citizens of higher social and economics status participate*

[7] ibid
[8] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

more in politics." (yang utama tentang kehadiran bahwa warga negara yang status sosial dan ekonomi lebih berpartisipasi politik).[9]

Penjelasan di atas menunjukkan hubungan yang meyakinkan antara tingkat status sosial-ekonomi dengan kehadiran atau ketidak hadiran pemilih. Lazimnya, variabel status sosial-ekonomi digunakan untuk menjelaskan perilaku memilih. Namun dengan menggunakan proporsi yang berlawanan, pada saat yang sama variabel tersebut sebenarnya juga dapat digunakan untuk menjelaskan perilaku *non-voting.* Artinya, jika tinggi tingkat pendidikan berhubungan dengan kehadiran memilih, itu berarti rendahnya tingkat pendidikan berhubungan dengan ketidakhadiran pemilih.

Terdapat beberapa alasan mengapa tingkat status sosial-ekonomi berkorelasi dengan kehadiran atau ketidakhadiran pemilih, seperti dijelaskan Raymond F Wolfinger dan steven J.Rossenstone yaitu:

a. Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih mengahargai partisipasi pada pemilu. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.
b. Para pegawai negeri atau pensiunan, menunjukkan tingkat kehadiran memilih lebih tinggi dibanding dengan yang lain. Sebab, mereka sering terkena langsung dengan kebijakan pemerintah, seperti misalnya

[9] ibid

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kenaikan\ gaji, pemutusan hubungan kerja, dan sebagainya. Begitu pula para pensiunan yang sangat berkepentingan langsung dengan berbagai kebijakan pemerintah, khususnya tentang besarnya tunjangan pensiun kesehatan, kesejahteraan atau tunjangan-tunjangan lainnya.

c. Tingkat pendidikan tinggi menciptakan kemampuan lebih besar untuk mempelajari kehidupan politik tanpa rasa takut. disamping menginginkan seseorang menguasai aspek-aspek birokrasi, baik pada saat pendaftaran maupun pemilihan dalam sebuah tulisannya, Wolfinger dan Rossestone menjelaskan sebagai berikut: disekolah dan perkuliahan, kita belajar mengenai sistem politik dan bagaimana suatu isu mempengaruhi hidup kita, dan diterangkan untuk menekan teman sebayanya untuk berpartisipasi dalam proses politik, dan suatu perolehan dari rasa keberhasilan, dari mengambil alih takdir kita. Segala pengaruh ini mempengaruhi kita untuk memberikan suara. Yang kurang berpendidikan dengan perbedaan terpengaruh untuk menghindari politik karena kekurangan mereka terhadap kepentingan dalam suatu proses politik, ketidak pedulian atas hubungannya terhadap kehidupan mereka, dan kekurangan kemampuan mereka perlu dihadapkan pada aspek-aspek birokratik dari memilih dan mendaftar.

d. Pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatanya dalam proses pemilu “para pemilih yang tingkat pendapatanya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang latar belakang pendapatan tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu rendah".

Berdasarkan pemaparan mengenai faktor-faktor penyebab golput di atas, dalam penelitian ini menggunakan empat faktor yakni, faktor psikologis, faktor sistem politik, faktor kepercayaan politik dan faktor latar belakang status sosial ekonomi sebagi berikut:

1. Faktor psikologis untuk menggetahui penyebab golput yang dilihat dari kepribadian dan orientasi kepribadian. Kepribadian seseorang ini melihat bahwa kepribadian yang tidak toleran, tak acuh, kurang mempunyai tanggung jawab secara pribadi atau semacamnya. Apabila dijelaskan secara spesifik, kepribadian seseorang ini berkaitan dengan diri kepribadian pemilih yang terlihat kurang bertanggung jawab, tidak acuh, dan tidak toleran. Orientasi kepribadian melihat dari rendahnya sosialisasi politik, tidak merasakan kepuasan dari aktifitas politik, merasakan aktivitas politik tidak mempengaruhi peristiwa ataupun kebijakan politik. Mengangap dirinya tidak terlibat dalam urusan politik, dan berpengaruh terhadap kehidupanya. Faktor psikologis dalam penelitian ini diukur dari Minat/keterlibatan dalam persoalan atau aktifitas politik serta sosialisasi dan rangsangan politik dari kandidat.
2. Faktor sistem politik mengetahui penyebab golput yang dilihat dari sistem politik dan sistem pemilu. Faktor sistem pemilu dalam penelitian ini diukur dari tahap penyelengaraan teknis pemilu, sosialisasi pemilu, dan kepala daerah yang aspiratif kepada kepentingan rakyat. Sistem

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

politik dalam penelitian ini dikarenakan pemilih kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah, pemilih melihat sistem pemilu tidak membawa kepada perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilih kecewa dengan kinerja panitia penyelengara pemilu (KPU, PPK, PPS).

3. Faktor kepercayaan politik mengetahui penyebab golput yang melihat dari ketidak percayaan dari saluran politik dalam bentuk kandidat atau partai poltik. Faktor ini melihat pemilih yang tidak percaya pada janji politik, kandidat kurang berprestasi, kandidat tidak dekat dengan masyarakat, kemampuan kandidat kurang memadai, pemilih kecewa karna pilihanya tidak ikut berkopetisi dan lain-lain. Faktor kepercayaan politik dalam penelitian ini diukur dari kedekatan kandidat yang berkompetisi, kepercayaan terhadap kandidat, dan kompetensi/kapabiltas kandidat.
4. Faktor latar belakang status sosial-ekonomi mengetahui penyebab golput yang dilihat dari tingkat pendidikan, tingkat pendapatan, dan tingkat pekerjaan. Faktor latar belakang status sosial-ekonomi dalam penelitian dapat diukur dari tingkat pendidikan, tingkat pendidikan yang rendah cendrung menunjukkan angka ketidak hadiran cukup tinggi dalam pemilu. Tingkat pendapatan, pendapatan tinggi memudahkan orang menanggung beban finansial akibat keterlibatanya dalam proses pemilu "para pemilih yang tingkat pendapatanya rendah cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran cukup tinggi. Sebaliknya, pemilih yang latar

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

belakang pendapatan tinggi cenderung menunjukkan angka ketidakhadiran dalam pemilu rendah. Pekerjaan-pekerjaan tertentu lebih mengahargai partisipasi pada pemilu. Para pemilih yang bekerja di lembaga-lembaga sektor-sektor yang berkaitan langsung dengan kebijakan pemerintah cenderung lebih tinggi tingkat kehadiran dalam pemilu dibanding para pemilih yang bekerja pada lembaga-lembaga atau sektor-sektor yang tidak mempunyai kaitan langsung dengan kebijakan-kebijakan pemerintah.

B. Kerangkah Berfikir

Dalam Pemilu baik PILEG, PILPRES, maupun PILKADA peran dan keikutsertaan masyarakat sangat penting, karena sukses tidaknya pelaksanaan PEMILU salah satunya adalah ditentukan bagaimana partisipasi masyarakat dalam menggunakan hak pilihnya pada Pemilu tersebut. Pemilu merupakan salah satu tonggak penting yang merepresentasikan kedaulatan rakyat, sehingga dapat dikatakan bahwa tidak ada negara demokrasi tanpa memberikan peluang adanya pemilihan umum yang dilakukan secara sistematik dan berkala. Oleh karenanya pemilu digolongkan juga sebagai elemen terpenting dalam sistem demokrasi. Apabila suatu negara telah melaksanakan proses pemilu dengan baik, transparan, adil, teratur dan berkesinambungan, maka negara tersebut dapat dikatakan sebagai negara yang tingkat kedemokratisannya baik, namun sebaliknya apabila suatu negara tidak melaksanakan pemilu atau tidak mampu melaksanakan

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pemilunya dengan baik, dimana terjadinya berbagai kecurangan, diskriminasi, maka negara itu pula dinilai sebagai negara yang anti demokrasi.

Partisipasi politik yang merupakan wujud pengejawantahan kedaulatan rakyat adalah suatu hal yang sangat fundamental dalam proses demokrasi. Ia memiliki makna yang sangat penting dalam bergeraknya roda dan sistem demokrasi. Apabila masyarakat, memiliki tingkat partisipasi yang tinggi, maka proses pembangunan politik akan berjalan dengan baik, sehingga akan sangat berarti pula terhadap perkembangan bangsa dan negara ini. Sebaliknya partisipasi politik juga tidak akan bermakna apa-apa dan tidak berarti sama sekali kalau ia tidak memenuhi syarat dari segi kualitatif maupun kuantitif. Oleh karenanya tingkat partisipasi politik masyarakat dalam pemilihan umum, termasuk pemilihan kepala daerah merupakan hal yang sangat penting pula untuk ditilik, karena rendah atau tingginya suatu partisipasi merupakan sinyal dan indikator penting terhadap jalannya proses demokasi dan pengejawantahan dari kedaulatan rakyat.[10]

Sebagai implikasi ketentuan pemilihan tersebut maka partai politik berlomba-lomba melakukan kampanye dan propaganda atas calon yang mereka usung dari masing-masing partai politik terhadap rakyat. Kampanye pada prinsipnya merupakan suatu proses kegiatan komunikasi individu atau kelompok yang dilakukan secara terlembaga dan bertujuan untuk menciptakan suatu efek atau dampak tertentu. Rogers dan Storey (1987) mendefinisikan kampanye sebagai "serangkaian tindakan komunikasi yang terencana dengan tujuan untuk

[10]Tim Peneliti FSIP UMM, *Perilaku Partai Poliitik,* (Malang: UMM Press, 2006), hal. 18-31.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menciptakan efek tertentu pada sejumlah besar khalayak yang dilakukan secara berkelanjutan pada kurun waktu tertentu" (Venus, 2004:7).[11]

Faktor sistem politik mengetahui penyebab golput yang dilihat dari sistem politik dan sistem pemilu dikarenakan kecewa dengan kebijakan dan implementasi dari pemerintah, pemilih melihat sistem pemilu tidak membawa kepada perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara, pemilih kecewa dengan kinerja panitia penyelengara pemilu (KPU, PPK, PPS), dan lain sebagainya. Faktor sistem politik dalam penelitian ini diukur dari: pemahaman tahap teknis penyelengaraan pemilu, sosialisasi pemilu, netralitas panitia penyelengara pemilu, dan kepala daerah yang aspiratif kepada kepentingan rakyat.

Dan Dalam Kegiatan kampanye dilakukan bukan tanpa aturan, melainkan ditertibkan melalui Perppu No. 1 Tahun 2014 tentang pemilhan Gubernur, Bupati, dan Walikota yang kemudian ditetapkan sebagai UU No. 1 Tahun 2015 tentang penerapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjad Undang-undang, yang selanjutnya diubah dengan UU No. 8 Tahun 2015 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang penetapan peraturan pemerintah pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-undang.[12] Kegiatan kampanye tidak akan berarti apabila tidak ada fasilitas dan atribut kampanye,

---

[11]Muchlis, *KampaneP olitik,* (Surabaya: PT.Revka Petra Media, 2013), 1-12

[12]Undang-undang No.1 Tahun 2015, Tentang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-UndangNomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (LN Tahun 2014 No. 245, TLN No.5588)

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

penggunaannya-pun diatur dalam UU No. 8 Tahun 2015 Pasal 65 Ayat (1) huruf E.[13]

Undang-undang No. 8 Tahun 2015 Pasal 65 Ayat (1) huruf E menyebutkan bahwa kampanye dapat dilaksanakan melalui pemasangan alat peraga. Ketentuan tersebut menjadi fokus peneliti karena alat peraga kampanye dinilai sangat berpengaruh terhadap partisipasi politik masyarakat disamping faslitas kampanye lainnya. Alat peraga kampanye diatur dalam PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, yakni terdapat pada :

Pasal 28 Ayat (2) bahwa KPU Provinsi, Kabupaten/Kota memfasilitasi pembuatan dan pemasangan alat peraga kampanye, yakni:

a. Baliho/billboard/vedeotron paling besar ukuran 4 m x 7 m, paling banyak 5 buah setiap pasangan calon untuk setiap Kabupaten/Kota
b. Umbul-umbul paling besar ukuran 5 m x 1,15 m, paling banyak 20 buah setiap pasangan calon untuk setiap kecamatan; dan/atau
c. Spanduk paling besar ukuran 1,5 m x 7 m, paling banyak 2 buah setiap pasangan calon untuk setiap desa atau sebutan lain/kelurahan.[14]

Dapat disimpulkan bahwa PKPU memberikan batasan dalam berkampanye. Hal tersebut bertujuan untuk mengembalikan esensi kampanye yakni sebagai

[13]*Ibid.*
[14]PKPU (Peraturan Komisi Pemilihan Umum) No. 7 Tahun 2015 tentang pencalonan pemilihan Gubernurdan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakl Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

pendidikan politik masyarakat yang dilaksanakan secara bertanggung jawab. Adapun dengan peraturan tentang pembatasan tersebut seharusnya menjadi kesempatan bagi Partai Politik untuk mensosialisasikan pasangan calonnya terkait PKPU Tahun 2015, dimana tdak seperti peraturan sebelumnya yang membebaskan parpol untuk membuat alat peraga kampanye semampu mereka, namun berbanding terbalik dengan fakta yang ada di Desa Tambak Oso dimana partai politik tidak memanfaatkan fasiltas kampanye semaksimal mungkin, sehingga banyak masyarakat yang tidak menggunakan hak pilihnya dan pengaruh minimnya sosialisasi alat peraga kampanye partai politik terhadap jumlah hak pilih terbukti bahwa saat pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Kabupaten Sidoarjo pada 9 Desember 2015, angka golput meningkat.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Gambar : Kerangka Berfikir

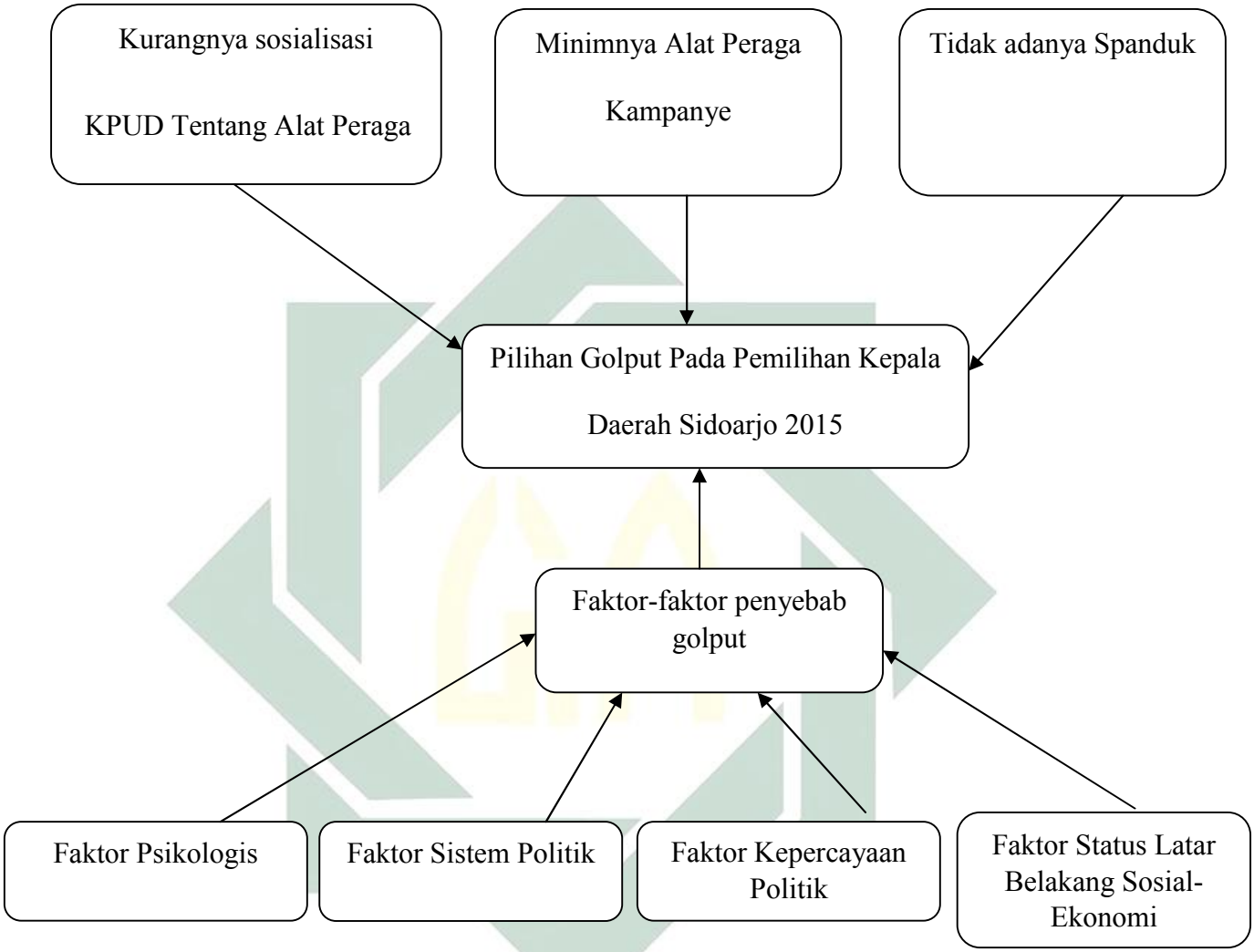

C. Hipotesis

Hipotesis merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penulisan, dimana rumusan penulisan, telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara, karena jawaban yang diberikan baru di dasarkan pada teori yang relevan, belum berdasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data-data. Jadi hipotesis juga dinyatakan sebagai jawaban teoritis

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

terhadap rumusan masalah penulisan, belum jawaban yang empirik.[15] Jenis hipotesis dibedakan menjadi dua, yaituu:

1. Ho (H nol), yaitu hipotesis yang menyatakan ketiadaan hubungan antara variabel yang sedang dioperasionalkan.
2. Hipotesis alternative (Ha), yaitu hipotesa yang menyatakan keberadaan hubungan diantara variabel yang sedang dioperasionalkan

Berdasakan pemaparan yang sudah diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

Pengaruh penggunaan alat peraga kampanye terhadap pilihan Golput di Sidoarjo tahun 2015

Ha : Ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan alat peraga kampanye terhadap pilihan golput pada pemilihan kepala daerah di sidoarjo

Ho : Tidak ada pengaruh yang signifikan antara penggunaan alat peraga kampanye terhadap pilihan golput pada pemilihan kepala daerah di sidoarjo

[15]Prof. Dr. Sugiyono, *Metode Penelitian Kmbinasi (Mixwd Methodes),),* (Bandung : Penerbit Alfabeta, 2010), 223

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id